

ABSTRAK

Keputusan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara Indonesia merupakan salah satu keputusan politik kenegaraan yang memiliki visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai proyek dengan anggaran besar dan kompleks, pengelolaan keuangannya harus dilakukan secara akuntabel, bebas dari praktik korupsi, dan didukung dengan sistem pengawasan yang ketat agar dapat berjalan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi pembangunan IKN harus sejalan dengan prinsip dan tujuan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pembangunan IKN saat ini terkait dengan potensi korupsi, peluang, dan hambatan dalam pencegahannya. Sehingga studi ini dapat menghasilkan saran kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian menggunakan analisis kualitatif menggunakan sumber data/bahan hukum primer dan sekunder. Kegiatan pengolahan data/bahan hukum dimulai dengan pengumpulan, analisis dan penyajian, selanjutnya dirumuskan dan disajikan secara sistematis dan deskriptif sesuai pokok bahasan masing-masing. Hasil kajian menunjukkan adanya potensi korupsi pada aspek kelembagaan Otorita IKN yang masih lemah dalam pengawasan, skema pembiayaan yang rentan konflik kepentingan, dan pelaksanaan pembangunan IKN di mana dalam pengadaan barangnya masih berpotensi menimbulkan suap dan konflik kepentingan. Hal ini menjadikan pembangunan IKN tidak sejalan dengan prinsip *good governance*. Maka untuk mencegah potensi korupsi dalam pembangunan IKN, diperlukan optimalisasi pencegahan yang lebih baik di ketiga aspek tersebut, baik dalam penyusunan klausul pada regulasi maupun pembentukan lembaga. Hal ini diharapkan dapat membuat proyek IKN dapat berjalan efisien, efektif, dan tidak terjadi praktik korupsi.

Kata Kunci: IKN, pembangunan, regulasi, korupsi, *good governance*

ABSTRACT

The decision to develop the Archipelago Capital (IKN) as the capital city of Indonesia is one of the state political decisions that has a big vision towards a Golden Indonesia 2045. As a project with a large and complex budget, its financial management must be carried out in an accountable manner, free from corrupt practices, and supported with a strict monitoring system so that it can run by prioritizing the principles of good governance. Therefore, IKN development policies and regulations must be in line with these principles and objectives.

This study aims to describe the current condition of IKN development related to the potential for corruption, opportunities and obstacles in preventing it. So this study can produce policy that can be implemented in the implementation of IKN development. The legal research method used in writing this thesis is a normative juridical research method, with a statutory approach. The research uses qualitative analysis using primary and secondary legal data/material sources. Data/legal material processing activities begin with collection, analysis and presentation, then formulated and presented systematically and descriptively according to the respective subject matter. The results of the study show the potential for corruption in the institutional aspects of the IKN Authority which are still weak in supervision, financing schemes which are vulnerable to conflicts of interest, and the implementation of IKN development where the procurement of goods still has the potential to give rise to bribery and conflicts of interest. This makes the development of IKN not in line with the principles of good governance.

So, to prevent potential corruption in IKN development, better prevention optimization is needed in these three aspects, both in the preparation of clauses in regulations and the formation of institutions. It is hoped that this will enable the IKN project to run efficiently, effectively and without corrupt practices occurring.

Keywords: *IKN, development, regulation, corruption, good governance*